



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS
6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, maka setiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum;

b. bahwa Laporan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, telah disetujui dalam rapat Paripurna pada tanggal 7 Agustus 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Terhadap Hasil Pembahasan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menyetujui terhadap Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bantul sebagai dasar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 AUG 2023

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR **22** TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN
PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

A. LAPORAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi A dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi A telah menerima laporan kinerja selama 6 bulan, dari kegiatan yang telah disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2023 masing-masing beda penyerapannya berkisar antara 35-40 % dari anggaran yang ada karena laporan dibuat pada akhir bulan Juni 2020. Diharapkan 6 (enam) bulan kedepan tingkat penyerapannya sesuai target dan perencanaan
2. Tak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Bantul yang ke-192 semoga dengan bertambahnya usia semakin menjadikan Kabupaten Bantul jaya. **Nyawiji Mbangun Nagari, Resik Lingkungane, Sehat Makmur Wargane.**
3. Layanan Pemerintah Daerah saat ini telah makin baik, terbukti di masing-masing Kapanewon telah dibangun dan disediakan tempat pelayanan masyarakat satu pintu lengkap dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta, menyebabkan tumpukan sampah di Bumi Projotamansari. Oleh karena itu penting bagi setiap masyarakat untuk mengedukasi generasi muda mulai memilah sampah dan tidak membuang sembarangan. Selanjutnya Pemerintah harus sudah mulai memikirkan konsep penanganan yang tepat.
5. Adapun hasil pembahasan bersama OPD sebagai berikut:

a. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp26.256.038.543,-

Realisasi semester pertama : Rp6.035.275.779,- (22,99%)

Sisa Anggaran : Rp20.220.762.764,-

Prognosis : Rp20.220.762.764,-

b. **DISDUKCAPIL**

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp12.264.240.945,-

Realisasi semester pertama : Rp6.872.887.316,- (56,04%)

Sisa Anggaran : Rp5.391.353.629,-

Prognosis : Rp5.391.353.629,-

c. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp25.302.056.675,-
Realisasi semester pertama : Rp8.607.415.684,- (34,02%)
Sisa Anggaran : Rp16.694.640.991,-
Prognosis : Rp16.694.640.991,-

d. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp17.157.849.505,-
Realisasi semester pertama : Rp9.132.743.227,- (53,23%)
Sisa Anggaran : Rp8.025.106.278,-
Prognosis : Rp8.025.106.278,-

e. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp13.298.162.581,-
Realisasi semester pertama : Rp5.710.903.694,- (42,95%)
Sisa Anggaran : Rp7.587.258.887,-
Prognosis : Rp7.587.258.887,-

f. SEKRETARIAT DPRD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp53.837.278.358,-
Realisasi semester pertama : Rp21.599.040.125,- (39,39%)
Sisa Anggaran : Rp33.238.238.233,-
Prognosis : Rp33.238.238.233,-

g. INSPEKTORAT DAERAH

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp13.308.314.458,-
Realisasi semester pertama : Rp6.194.923.990,- (46,55%)
Sisa Anggaran : Rp7.113.390.468,-
Prognosis : Rp7.113.390.468,-

h. BAGIAN HUKUM

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp1.714.746.000,-
Realisasi semester pertama : Rp524.275.200,- (30,57%)
Sisa Anggaran : Rp1.190.470.800,-
Prognosis : Rp1.190.470.800,-

i. BPBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp17.084.044.661,-
Realisasi semester pertama : Rp6.998.625.235,- (40,97%)
Sisa Anggaran : Rp10.085.419.426,-
Prognosis : Rp10.085.419.426,-

j. KESBANGPOL

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp13.466.577.187,-
Realisasi semester pertama : Rp4.725.900.020,- (35,09%)
Sisa Anggaran : Rp8.740.677.167,-
Prognosis : Rp8.740.677.167,-

k. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp1.526.888.602,-
Realisasi semester pertama : Rp733.131.300,- (48,01%)
Sisa Anggaran : Rp793.757.302,-
Prognosis : Rp793.757.302,-

l. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp10.998.534.034,-
Realisasi semester pertama : Rp4.525.145.728,- (41,14%)
Sisa Anggaran : Rp6.473.388.306,-
Prognosis : Rp6.473.388.306,-

m. BAGIAN ORGANISASI

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp1.884.929.000,-
Realisasi semester pertama : Rp528.785.995,- (28,05%)
Sisa Anggaran : Rp1.356.143.005,-
Prognosis : Rp1.356.143.005,-

n. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp21.475.218.314,-
Realisasi semester pertama : Rp11.621.817.147,- (54,12%)
Sisa Anggaran : Rp9.853.401.167,-
Prognosis : Rp9.853.401.167,-

o. KAPANEWON BANTUL

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.226.613.288,-
Realisasi semester pertama : Rp1.582.437.378,- (49,04%)
Sisa Anggaran : Rp1.644.175.910,-
Prognosis : Rp1.644.175.910,-

p. KAPANEWON DLINGO

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.492.059.556,-
Realisasi semester pertama : Rp1.780.880.373,- (51,00%)
Sisa Anggaran : Rp1.711.179.183,-
Prognosis : Rp1.711.179.183,-

q. KAPANEWON SEWON

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.621.644.836,-
Realisasi semester pertama : Rp1.721.894.875,- (47,54%)
Sisa Anggaran : Rp1.899.749.961,-
Prognosis : Rp1.899.749.961,-

r. KAPANEWON PANDAK

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.474.710.902,-
Realisasi semester pertama : Rp1.638.278.103,- (47,15%)
Sisa Anggaran : Rp1.836.432.799,-
Prognosis : Rp1.836.432.799,-

- s. KAPANEWON SRANDAKAN
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.282.561.678,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.665.693.051,- (50,74%)
 Sisa Anggaran : Rp1.616.868.627,-
 Prognosis : Rp1.616.868.627,-
- t. KAPANEWON BANGUNTAPAN
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.848.360.699,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.797.265.973,- (46,70%)
 Sisa Anggaran : Rp2.051.094.726,-
 Prognosis : Rp2.051.094.726,-
- u. KAPANEWON KASIHAN
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.703.684.204,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.948.081.941,- (52,60%)
 Sisa Anggaran : Rp1.755.602.263,-
 Prognosis : Rp1.845.602.263,-
- v. KAPANEWON KRETEK
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.611.637.842,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.860.873.422,- (51,52%)
 Sisa Anggaran : Rp1.750.764.420,-
 Prognosis : Rp1.750.764.420,-
- w. KAPANEWON JETIS
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.161.603.633,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.522.004.625,- (48,14%)
 Sisa Anggaran : Rp1.639.599.008,-
 Prognosis : Rp1.639.599.008,-
- x. KAPANEWON PAJANGAN
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.507.607.973,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.572.738.862,- (44,84%)
 Sisa Anggaran : Rp1.934.869.111,-
 Prognosis : Rp1.934.869.111,-
- y. KAPANEWON BAMBANGLIPURO
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.402.440.524,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.633.746.752,- (48,02 %)
 Sisa Anggaran : Rp1.768.693.772,-
 Prognosis : Rp1.768.693.772,-
- z. KAPANEWON PLERET
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.574.651.644,-
 Realisasi semester pertama : Rp1.534.408.703,- (42,92%)
 Sisa Anggaran : Rp2.040.242.941,-
 Prognosis : Rp2.040.242.941,-

å. KAPANEWON PUNDONG

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.270.205.152,-
Realisasi semester pertama : Rp1.553.413.608,- (47,50%)
Sisa Anggaran : Rp1.716.791.544,-
Prognosis : Rp1.716.791.544,-

aa. KAPANEWON PIYUNGAN

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.623.271.655,-
Realisasi semester pertama : Rp1.792.824.231,- (49,48%)
Sisa Anggaran : Rp1.830.447.424,-
Prognosis : Rp1.880.447.424,-

bb. KAPANEWON IMOGIRI

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.478.521.831,-
Realisasi semester pertama : Rp1.720.836.405,- (49,47%)
Sisa Anggaran : Rp1.757.685.426,-
Prognosis : Rp1.817.685.426,-

cc. KAPANEWON SANDEN

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.176.386.726,-
Realisasi semester pertama : Rp1.542.322.599,- (48,56%)
Sisa Anggaran : Rp1.634.064.127,-
Prognosis : Rp1.689.064.127,-

dd. KAPANEWON SEDAYU

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 sebesar : Rp3.535.586.211,-
Realisasi semester pertama : Rp1.766.011.297,- (49,95%)
Sisa Anggaran : Rp1.769.574.914,-
Prognosis : Rp1.769.574.914,-

B. LAPORAN KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul bersama mitra kerja terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, maka Komisi B DPRD Kabupaten Bantul dapat menyampaikan laporannya sebagai berikut :

1. Komisi B menerima dan memahami laporan Realisasi Semester I dari masing-masing OPD yang realisasinya belum mencapai target sebesar 50% hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.
2. Komisi B **menekankan** bahwa memajukan Pariwisata sama dengan memajukan perekonomian karena menyumbang PAD serta membuka lapangan kerja dan mudah, sehingga ekonomi masyarakat Bantul bisa meningkat . Dinas Pariwisata berencana untuk pembangunan ruang podcast sebagai sarana untuk promosi kepariwisataan.

3. Dalam pembahasan telah disepakati untuk :

a. BPKPAD

Komisi mendorong untuk tercapainya pendapatan sesuai dengan target ataupun dapat melampaui sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 1) Dalam upaya meningkatkan PAD terdapat usulan untuk perbaikan Fasilitas kebun Buah Mangunan,
- 2) Pengawasan dan penanggulangan penyakit antrak yang sempat merebak. Dan menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadainya dengan berupaya sedini mungkin untuk pencegahannya.
- 3) Kegiatan kegiatan yang tertunda perlu segera dilaksanakan untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang ada di OPD seperti kegiatan Sosialisasi dan pelatihan.
- 4) **Hasil pertemuan Komisi B** dengan masyarakat petani Pansela diskusi saresehan bersama yang dihadiri Anggota Komisi B , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Koramil, Anggota TNI AL , Polsek , Kapanewon Sanden serta jajaran desa menerima aspirasi Kelompok Tani yang hadir :
 - a) Kenyamanan dan kedamaian dalam bertani ;
 - b) Terkait **isu** alih fungsi lahan yang peruntukannya untuk tambak udang dan perhotelan mohon pemerintah daerah (Bapak Bupati) untuk melakukan peninjauan kembali;
 - c) Serta mohon untuk didampingi dalam proses ijin palilah kekancingan guna mempertahankan pertanian Lahan pasir dari ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X .

c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,

Untuk kedepan pasar Seni Gabusan akan dibangun hotel dan sentra kuliner untuk anak anak sekolah sehingga akan memajukan pertumbuhan ekonomi Bantul .

Terkait tanahnya itu tanah kas desa yang otomatis harus izin gubernur, dinas akan mengajukan perpanjangan, yang kebetulan di tahun 2023 izinnya habis, jadi akan diperpanjang lagi dan sudah diusulkan ke Bupati.

d. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pemanfaatan BBI Pundong guna menambah PAD. Selanjutnya untuk 6 bulan ke depan segera melaksanakan kegiatan yang tertunda selama ini.

e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terdapat pergeseran anggaran yang diperuntukan promosi dan pemanfaatan Kantor terpadu Satu Pintu.

f. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

- 1) Perlu dilakukan pengawasan untuk sektor perbankan, mendorong untuk meningkatkan Kinerja Aneka Dharma sehingga menghasilkan PAD sesuai modal yang dikucurkan pemerintah.
- 2) Komisi B **sangat berharap** agar PD. Aneka Dharma bisa meningkatkan kinerja maupun usahanya sehingga benar-benar dapat menjadi BUMD yang handal dan kontributif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. LAPORAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan hasil pembahasan dan pencermatan Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

A. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL

Untuk Belanja

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023	: Rp22.648.074.156,-
Realisasi semester pertama	: Rp4.895.927.047,- (21,62%)
Sisa Anggaran	: Rp17.752.147.109,-
Prognosis 6 bulan ke depan	: Rp17.752.147.109,-

Pada semester II, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merencanakan pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun dalam satu kegiatan.

Kecilnya serapan anggaran pada semester I di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diantaranya disebabkan karena adanya keterlambatan proses transfer DANAIS ke APBD dan adanya persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (**TKDN**) dalam pengadaan barang dan jasa.

B. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Pendapatan

Target pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.851.598.820,- untuk semester I terealisasi Rp1.005.939.560,- (54,33%) prognosis pendapatan untuk 6 bulan berikutnya Rp845.659.260,-

Belanja

Jumlah Belanja Tahun 2023	: Rp42.077.737.356,-
Realisasi semester pertama	: Rp14.232.135.735,53 (33,82%)
Sisa Anggaran	: Rp27.845.601.620,47,-
Prognosis 6 bulan ke depan	: Rp27.845.601.620,47,-

Pada semester II, Dinas Lingkungan Hidup merencanakan pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun dalam satu kegiatan. Serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada semester I masih relatif kecil. Hal ini disebabkan karena adanya penundaan kegiatan sosialisasi, adanya perubahan metode pengadaan barang dan jasa (penggunaan e katalog), adanya persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (**TKDN**) dalam pengadaan barang dan jasa dan adanya tender yang harus diulang.

C. BAPPEDA KABUPATEN BANTUL

Untuk Belanja

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2022	: Rp13.750.250.571,-
Realisasi semester pertama	: Rp5.668.627.474,39,- (41,23%)
Sisa Anggaran	: Rp8.081.623.096,61,-
Prognosis 6 bulan ke depan	: Rp8.081.623.096,61,-

Pada semester II, Bappeda merencanakan pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun dalam satu kegiatan. Disamping itu akan ada tambahan beberapa kegiatan untuk menindaklanjuti temuan BPK. Hal ini sudah disampaikan ke TAPD.

D. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BANTUL

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023	: Rp1.592.604.366,-
Realisasi Semester I	: Rp543.889.013,- (34,15%)
Sisa Anggaran	: Rp1.048.715.353,-
Prognosis	: Rp1.048.715.353,-

Komisi C dapat memahami rencana pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun dalam satu kegiatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada semester II. Belanja rehab atap gedung sebesar Rp 50 juta digeser untuk pengadaan 3 laptop dan 1 printer. Komisi C mendukung pengadaan mobil operasional untuk membantu memperlancar proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.

E. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL (DPU PKP KABUPATEN BANTUL)

Pendapatan

Target pendapatan Tahun 2023 di Dinas PUPKP sebesar Rp3.846.042.500,- untuk semester I terealisasi Rp1.350.016.181,80,- (35,10%). Prognosis pendapatan untuk 6 bulan berikutnya Rp2.496.026.318.20,-

Belanja

Anggaran Belanja Tahun 2023 di Dinas PU PKP sebagai berikut :

Pagu Anggaran	: Rp161.775.916.662,-
Realisasi semester pertama	: Rp15.517.514.880,- (9,59%)
Sisa Anggaran	: Rp146.258.401.782,-
Prognosis 6 bulan ke depan	: Rp146.258.401.782,-

Realisasi anggaran pada semester I di Dinas PUPKP masih relatif kecil hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan di Dinas PUPKP Tahun 2023 sedang dalam proses lelang/tender. Dinas PUPKP dalam pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya menggunakan E Katalog. Kendala yang dihadapi dalam penerapan E Katalog diantaranya adalah :

1. Karena sistem yang baru harus lebih intens dalam belajar.
2. Dalam sistem E Katalog, pekerjaan pembangunan Gedung dan Jembatan, item pekerjaan terlalu rigid sehingga PPK mengalami kesulitan.

F. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Pendapatan

Target pendapatan Tahun 2023 di Dinas Perhubungan sebesar Rp2.007.144.500,- untuk semester I terealisasi Rp764.161.540,- (38,07%) prognosis pendapatan untuk 6 bulan berikutnya sebesar Rp1.242.982.960,-

Untuk Belanja Tahun 2023 di Dinas Perhubungan

Jumlah Pagu Anggaran	: Rp29.099.153.169,-
Realisasi semester pertama	: Rp13.165.974.735,- (45,25 %)
Sisa Anggaran	: Rp15.933.178.434,-
Prognosis 6 bulan ke depan	: Rp15.933.178.434,-

Komisi C memberikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran semester I di Dinas Perhubungan. Pada semester II, Dinas Perhubungan merencanakan pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun dalam satu kegiatan.

Untuk semua paket pengadaan di Dinas Perhubungan sudah selesai pada Triwulan I dan II, kecuali pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum. Untuk Lampu Penerangan Jalan Umum direncanakan tanggal 5 September 2023 sudah terpasang semua.

Saran dan Pendapat Komisi C sebagai berikut :

1. Kami dapat memahami adanya rencana pergeseran anggaran baik antar kegiatan maupun dalam satu kegiatan di semua OPD Mitra Kerja Komisi C.
2. Komisi C berharap semua kegiatan pada semua OPD Mitra kerja Komisi C Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Terkait adanya "darurat sampah" yang diakibatkan dengan ditutupnya TPST Piyungan sampai dengan tanggal 5 September 2023, Komisi C berharap adanya sosialisasi yang intens kepada masyarakat agar ada pengurangan sampah secara ekstrim dari sumbernya. Disamping itu adanya optimalisasi pengolahan sampah oleh BUMDES/BUMKAL yang ada.

D. LAPORAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

HASIL PEMBAHASAN

A. RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

PENDAPATAN

Target Pendapatan di APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.190.000.000, adapun rinciannya sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Semester Pertama sejumlah Rp79.434.411.149 (55,47%),
- Sisa target pendapatan Semester Pertama sejumlah Rp63.755.588.851 (44,53%),
- Sedangkan prognosis Pendapatan di tahun 2023 adalah Rp158.185.759.761 sehingga mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.995.759.761, dari rencana pendapatan sebelumnya, hal ini yang diakibatkan adanya kenaikan nilai klaim BPJS per-Januari 2023.

BELANJA

Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp194.143.991.856, dengan pencapaian sebagai berikut ;

- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp109.569.900.160 (56,44%)
- Sisa anggaran Semester Pertama sejumlah Rp84.574.091.696 (43,56%) sedangkan.
- Prognosis sejumlah Rp235.219.671.648 sehingga mengalami **kenaikan belanja** sebesar Rp41.075.679.792 penambahan anggaran diperoleh dari SILPA Tahun 2022 serta penambahan akibat adanya penambahan target pendapatan.

SARAN :

1. Penambahan anggaran belanja karena penggunaan SILPA diharapkan mampu dipergunakan tepat sasaran dan mampu meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.
2. Komisi D berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Penataan ruang pelayanan yang lebih aman dan nyaman, Penyiapan tenaga medis yang tertata secara sistematis, serta lebih intens dalam mempromosikan terkait system pendaftaran pasien secara online sehingga dapat mengurangi antrian pasien di RSUD Panembahan Senopati.

B. DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN

- Adapun Target Pendapatan di APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.099.723.337
- Realisasi Pendapatan Semester Pertama sejumlah Rp29.296.883.382 (53,17%)
- Sisa target pendapatan sejumlah Rp25.802.839.955 (46,83%)
- Prognosis Pendapatan berikutnya sejumlah Rp25.802.839.955 sehingga tidak ada kenaikan.

BELANJA

- Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp237.582.746.570 dengan capaian
- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp95.530.466.529,80 (40,21%)
- Sisa Anggaran sejumlah Rp142.052.282.040,20 (39,71%)
- Prognosis sebesar Rp144.262.613.453,20 sehingga ada kenaikan anggaran belanja.

SARAN dan PENDAPAT:

1. Komisi D mendorong Dinas Kesehatan untuk mempercepat pencapaian target UHC sebesar 100% sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Bantul telah memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Mengapresiasi Dinas Kesehatan beserta dinas terkait yang telah berupaya menurunkan angka kasus stunting dari 8,30% menjadi 6,70% yang berdasarkan hasil data penanggulangan stunting di lapangan dan tentunya hal ini dapat mendukung IKU Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Perlunya penataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

C. DP3A dan PPKB

Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.541.747.649 dengan capaian ;

- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp6.702.690.291 (21,19%)
- Sisa Anggaran sejumlah Rp14.644.441.428 (78,81%)
- Prognosis Rp14.644.441.428, sehingga tidak ada kenaikan anggaran.

SARAN :

1. Mendorong percepatan realisasi program – program yang belum dijalankan secara optimal, mengingat minimnya serapan anggaran sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan di masyarakat.
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM di semua unit dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak.

D. DINAS SOSIAL

Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.346.831.719 dengan capaian :

- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp9.616.658.072 (45,29%)
- Sisa Anggaran sejumlah Rp11.618.634.231 (54,71%)
- Prognosis sebesar Rp11.618.634.231 dengan demikian tidak ada perubahan.

SARAN :

1. Komisi D mendorong Dinas Sosial untuk lebih mempercepat terkait updating data induk DTKS di Kabupaten Bantul, dengan harapan lebih tepat sasaran dalam memberikan bantuan ke masyarakat.
2. Komisi D memaklumi adanya rencana pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, berdasar analisa kebutuhan anggaran baik waktu pelaksanaan maupun volume kegiatan yang ingin dicapai.

E. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN & OLAH RAGA

PENDAPATAN

- Adapun Target Pendapatan di APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp200.000.000 dengan pencapaian sebagai berikut :
- Realisasi Pendapatan Semester Pertama sejumlah Rp132.130.000 (66,06%)
- Sisa target pendapatan sejumlah Rp67.870.000 (33,94%)
- Prognosis Pendapatan sejumlah Rp67.870.000 sehingga tidak ada kenaikan.

BELANJA

- Adapun Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp715.317.719.596 dengan pencapaian sebagai berikut :
- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp281.840.862.152,80 (39,40%)
- Sisa anggaran belanja dan prognosis sejumlah Rp433.476.857.443 (61,60%) sehingga tidak ada kenaikan anggaran.

SARAN :

- a. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru non ASN Komisi D berharap ada penambahan insentif yang diberikan setiap bulannya, mengingat pentingnya peran guru.
- b. Komisi D mendorong Disdikpora Kabupaten Bantul untuk lebih mengintensifkan kegiatan monitoring dan evaluasi di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Kepada Disdikpora diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pendampingan dalam hal penggunaan dana BOS/BOSDA dengan harapan mampu meningkatkan kualitas sekolah.

F. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.056.938.963 dengan pencapaian sebagai berikut :

- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp3.037.594.177 (50,15%)
- Sisa Anggaran belanja dan Prognosis sejumlah Rp3.019.344.786 (49,85%) sehingga tidak mengalami kenaikan belanja.

SARAN :

- a. Komisi D berharap untuk pemberian reward/penghargaan bagi OPD yang terbaik dalam mengelola arsip, untuk dapat diusahakan kuantitasnya sehingga mampu meningkatkan kepedulian terhadap penata kelolaan kearsipan.
- b. Perlu adanya kegiatan yang dapat menghidupkan Kembali perpustakaan desa sehingga mampu meningkatkan minat baca masyarakat.
- c. Komisi D memahami adanya pergeseran anggaran yang diperuntukan untuk pemenuhan kegiatan rencana belanja perjalanan dinas dalam upaya pendampingan DAK.

G. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Total Belanja pada APBD T.A 2023 sebesar Rp. 9.064.673.280 dengan pencapaian :

- Realisasi Semester Pertama sejumlah Rp3.598.410.032 (39,70%)
- Sisa Anggaran belanja dan Prognosis sejumlah Rp5.466.263.248 (60,30%) sehingga tidak perubahan anggaran.

SARAN :

1. Komisi D mendorong untuk melakukan pendataan ulang terkait data anak yatim/piatu sehubungan di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga dalam pemberian bantuan bagi anak yatim/piatu lebih maksimal.
2. Dalam upaya meningkatkan mental spiritual di masyarakat perlu adanya penambahan frekuensi kegiatan pembinaan dimaksud.

H. DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Total Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.324.887.787 dengan pencapaian :

- Realisasi Semester Pertama Rp3.409.981.699 (10,39%)
- Sisa Anggaran dan Prognosis sejumlah Rp. 29.415.906.068 (89,61%) sehingga tidak ada kenaikan anggaran.

SARAN :

- Optimalisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan desa budaya.
- Perlunya kegiatan yang lebih banyak melibatkan masyarakat guna memaksimalkan serapan anggaran DAIS.

I. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

BELANJA

Total Belanja di APBD Tahun Anggaran 2023 Rp64.469.256.475 dengan capaian;

- Realisasi Pendapatan Semester Pertama Rp55.306.510.269 (86%)
- Sisa Anggaran Belanja dan Prognosis sejumlah Rp9.162.746.206 (14%) sehingga tidak mengalami perubahan.

SARAN :

- a. Perlu adanya perluasan informasi bagi pencari kerja, sehingga terpenuhi kebutuhan bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan ekstrem.

- b. Program Perluasan Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu ditingkatkan variasinya dan Program Pelatihan Teknologi Tepat Guna sesuai kebutuhan perkembangan zaman, dan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri perlu dikembangkan.
- c. Mengapresiasi atas pelaksanaan padat karya yang telah tercapai seluruhnya dengan baik dan lancar.
- d. Perlu adanya penganggaran untuk pemenuhan operasional kendaraan dinas dalam upaya mendukung kelancaran tugas di lapangan.

KETUA,



HANUNG RAHARJO